

BAB 1

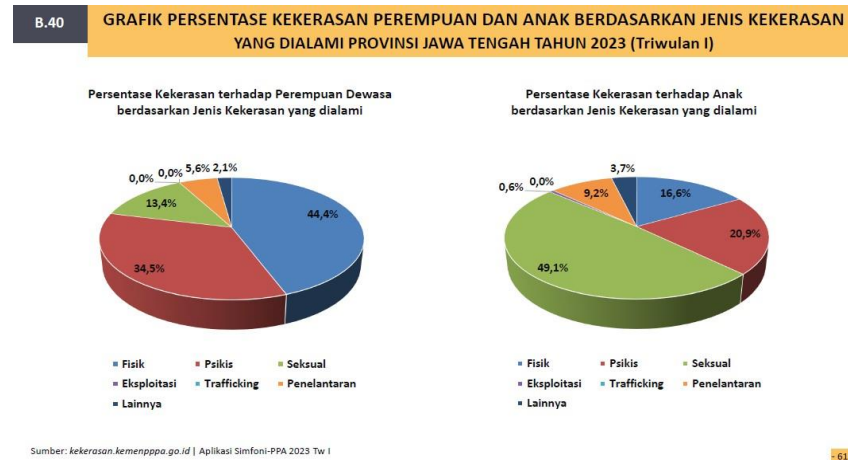
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak dalam pengertian umum mendapat perhatian tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistik kehidupan, seperti agama, hukum, dan sosiologis yang menjadikan anak tersebut semakin rasional dan aktual di dalam lingkungan sosial (Maulana H. W., 2000). Dalam hal ini, anak ditempatkan sebagai posisi yang memiliki status sosial yang terendah dalam kelompok sosial di lingkungan tempat untuk bersosialisasi atau berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah kepada perlindungan kodrati anak itu sendiri (Beni A. 2007).

Undang Undang yang mengatur dalam pemenuhan hak setiap anak yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam undang undang tersebut menjelaskan bahwa anak memiliki haknya sendiri dalam proses menjalankan kehidupannya. Kemudian terkait dengan adanya peraturan perlindungan anak di Kabupaten Rembang tercantum pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kabupaten Rembang telah menerapkan kebijakan terkait perlindungan anak pada tahun 2014 dengan menetapkan kebijakan Kabupaten layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak.

Gambar 1.1
Grafik Presentase Kekerasan Perempuan dan Anak
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id | Aplikasi Simfoni-PPA 2023 Tw |

Berdasarkan grafik kekerasan pada perempuan dan anak Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, menjelaskan bahwa presentasi pada kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Tengah terkait kekerasan seksual menjadi presentasi yang paling tinggi yaitu 49,1%. Hal ini menandakan bahwa presentase tersebut masih membutuhkan bantuan-bantuan pemerintah untuk bisa lebih melindungi anak.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kekerasan Pada anak Berdasarkan Jenisnya di
Kabupaten Rembang 2019-2023

Tahun	Jenis Kekerasan				Jumlah
	Fisik	Seksual	Psikologi	Penelantaran	
2019	4	7	-	-	11
2020	4	12	1	-	17
2021	3	10	-	-	13
2022	4	10	-	-	14
2023	8	5	-	1	14

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang

Dari data tersebut angka kekerasan yang terjadi di Kabupaten Rembang berdasarkan jenis kekerasan yang dilakukan pada anak dari kasus yang tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 17 kasus kekerasan yang dialami anak. Sedangkan untuk kasus kekerasan anak di Kabupaten Rembang yang mengalami penurunan kasus yaitu terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 11 kasus. Adanya tindakan kekerasan yang dialami oleh anak-anak bisa disebabkan adanya faktor dari permasalahan ekonomi, maupun dari tingkat pendidikan yang rendah. Tindakan kekerasan yang dilampiaskan kepada anak bisa memberikan pengaruh yang buruk bagi anak hingga bisa menyebabkan terjadinya trauma pada anak.

Adanya komunitas PKK menjadi salah satu entitas lokal yang mempunyai potensi dasar untuk memberikan perannya dalam perlindungan anak. Komunitas PKK mempunyai akses ke masyarakat secara langsung dan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kebijakan perlindungan anak. Peranan yang ada di PKK dalam sosialisasi terkait perlindungan anak khususnya di wilayah Kabupaten Rembang dengan mengadakan penyuluhan parenting terkait dengan pola asuh yang baik menjadikan anak berkepribadian kuat, tak mudah menyerah, dan memiliki sikap yang bertanggung jawab dalam menghadapi hidup yang penuh dengan warna warni kehidupan (dinsospkb,2019).

Penelitian ini mengacu pada peran tim Penggerak PKK dalam upaya menerapkan strategi kebijakan dalam mencegah dan mengurangi diskriminasi yang sering terjadi pada tingkat keluarga dan komunitas. Dalam konteks ini, PKK Kecamatan Gunem menjadi organisasi yang berfokus pada pemberdayaan keluarga di wilayah kecamatan. Dengan jangkauan hingga tingkat desa, PKK

Kecamatan Gunem menjadi garda terdepan di dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah untuk anak. Melalui program-program seperti Posyandu, Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Balita (BKB), dan program lainnya yang menyangkut partisipasi anak dalam berinteraksi dan berpendapat. Tujuannya adanya tim penggerak PKK di setiap daerah yaitu memperdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam kemajuan peranan wanita Indonesia.

Dalam strategi kebijakan anak, PKK Kecamatan Gunem mempunyai peran strategis untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program 10 pokok PKK dalam upaya mendidik keluarga dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Salah satu program kerja PKK Kecamatan Gunem yaitu mengajak masyarakat untuk menjalankan kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Melalui kegiatan seperti sosialisasi pola asuh anak dan remaja di era digital maupun sosialisasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur, berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak diskriminasi dan pentingnya pengasuhan positif. Selain itu, PKK Kecamatan Gunem juga berperan dalam pembentukan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak. Kebijakan yang dilakukan bisa berupa program kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta untuk menyediakan ruang aman bagi anak untuk belajar dan bermain, serta memastikan setiap anak mempunyai akses dalam pendidikan, kesehatan dan perlindungan.

Keberhasilan program-program PKK Kecamatan juga membutuhkan penguatan kapasitas kader PKK tingkat Kecamatan maupun Desa. Pelatihan

tentang hak-hak anak, strategi pendidikan berbasis keluarga, dan cara mendeteksi diskriminasi di tingkat komunitas menjadi langkah awal untuk memastikan efektifitas kebijakan program yang dijalankan. Dengan penguatan kapasitas kader PKK, dapat mendorong adanya perubahan positif dalam pola pikir dan perilaku masyarakat.

Desa Gunem menjadi salah satu desa di Kecamatan Gunem yang dijadikan contoh sebagai desa ramah anak oleh Menteri PPA Yohana Yembise pada Periode (2014-2019). Desa Gunem mampu untuk menekankan angka permasalahan terkait pernikahan dini pada anak dan kekerasan anak, hal tersebut dikarenakan adanya keaktifan dari KPAD dan Forum anak yang ikut berpartisipasi dalam mewujudkan desa ramah anak. Selain itu, peran *NGO* yakni Plan Internasional juga ikut andil di dalam memberikan pembekalan kepada anak-anak yang ada di Desa Gunem, yang mana anak-anak di latih untuk bisa lebih berani dalam menyuarakan aspirasi kepada pemerintah maupun publik.

Selanjutnya terkait desa ramah anak yang ada di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Dalam menerapkan Kabupaten Layak Anak, Desa Tegaldowo telah menerapkan desa ramah anak dengan adanya Kampung KB “Abadi”. Sebelum adanya Kampung KB ini Desa Tegaldowo terkenal akan pernikahan dini, hal ini bisa terjadi karena rata-rata tingkat pendidikan di desa tegaldowo tergolong masih rendah. Sehingga satu-satunya jalan untuk bisa menekan terjadinya pernikahan dini, pemerintah menambahkan tingkat pendidikan jenjang SMK. Adanya peningkatan pernikahan dini di Desa Tegaldowo menurut bupati Rembang dikarenakan masyarakat dulu belum

memahami bahwa untuk bisa mencapai suatu kesejahteraan diperlukannya strategi, salah satunya dengan adanya pendidikan (JatengProv. 2017).

Menurut Herbert McClosky partisipasi politik merupakan bentuk kegiatan sukarela dari masyarakat yang mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum (McClosky, H. (1968). Partisipasi PKK dalam hal pembangunan masyarakat juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan sosial, antara lain yang dapat dicapai dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan perlindungan keluarga. Adanya program kerja yang terencana, kolaboratif, dan berbasis adanya partisipasi masyarakat, menjadikan PKK Kecamatan Gunem mampu menjadi agen perubahan dalam pembangunan masyarakat akan pentingnya hak-hak anak. Dengan penerapan strategi yang tepat, PKK bisa menciptakan lingkungan yang tidak hanya melindungi anak, tetapi juga menjadi pendukung anak untuk berkembang menjadi generasi yang berkualitas.

Pembahasan ini difokuskan kepada partisipasi ibu PKK yang ada di Kecamatan Gunem dalam hal pemberdayaan masyarakat terkait perlindungan anak yang bisa diterapkan untuk memberikan pendampingan kepada anak. Oleh karena itu, peneliti memberikan judul untuk penelitian ini **“Analisis Peran Komunitas Pkk Dalam Melaksanakan Strategi Perlindungan Anak Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Komunitas Ibu PKK dalam mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak di Kecamatan Gunem ?
2. Sejauhmana peran ibu PKK di desa Gunem dan desa Tegaldowo dalam berkontribusi pada transformasi kesetaraan perempuan terkait dengan perlindungan anak, memperlemah atau justru memperkuat domestifikasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terkait bagaimana kebijakan perlindungan anak diimplementasikan di Kabupaten Rembang, serta untuk mengidentifikasi peran penting Komunitas Ibu PKK dalam mencapai tujuan perlindungan anak.
2. Untuk memberikan rekomendasi atau solusi dari adanya kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di Kabupaten Rembang, dengan memberikan pertimbangan terkait peranan aktif dari Komunitas Ibu PKK Kecamatan Gunem.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat yang bisa diambil dari adanya penelitian ini yaitu mampu menghasilkan manfaat yang signifikan dengan berkontribusi pada pemahaman

tentang strategi kebijakan perlindungan anak di tingkat Kabupaten dan peran komunitas dalam pelaksanaannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi terkait dengan pemahaman strategi kebijakan perlindungan anak dan peran komunitas, manfaat yang ingin dicapai antara lain :

1. Memberikan masukan kepada pejabat pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak dalam memahami peran dinamika kebijakan yang ada.
2. Memberikan bantuan terkait evaluasi efektivitas kebijakan perlindungan anak yang ada di Kabupaten Rembang. Hal ini akan membantu dalam menilai kebijakan yang diterapkan, apakah bisa mencapai tujuan perlindungan anak dengan baik atau masih perlu perbaikan.
3. Peningkatan peran komunitas Ibu PKK dalam memberikan panduan kepada Komunitas Ibu PKK di Kecamatan Gunem terkait cara mereka dalam berperan secara lebih efektif dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu cara yang biasa digunakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu serta akan mengkaji perbedaannya. Selain itu, penelitian terdahulu bertujuan untuk memperbanyak kajian referensi untuk penelitian selanjutnya dan memperbanyak bahan kajian orisinitas dari peneliti. Pada tahap ini, penelitian

terdahulu mencantumkan beberapa macam penelitian yang nantinya akan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini terdapat karya ilmiah yang dianggap relevan dengan pembahasan mengenai perlindungan anak, diantaranya adalah:

Peran keluarga dan masyarakat dalam perlindungan anak mengurangi tindak kekerasan oleh Ani Mardiyanti (2015). Penelitian yang diupload dalam Jurnal PKS Vol 14 No 4 Desember 2015 menjelaskan adanya tindakan kekerasan anak sehingga peneliti mencoba untuk mengungkap sebab akibat terjadinya tindak kekerasan, upaya pencegahan, peran keluarga, serta lingkungan masyarakat dalam mencegah atau mengurangi terjadinya tindak kekerasan pada anak di wilayah Yogyakarta. Dalam jurnal ini penelitian melakukan pengumpulan data secara in - depth interview yang terdiri dari Keluarga yang memiliki anak, ibu-ibu penggerak PKK ditingkat kota, kecamatan, desa, dusun dan RT, maupun kader Posyandu. Teori dalam penelitian ini menggunakan Teori agresivitas yang dikemukakan ahli psikologi Leonard Berkowitz (1993: 2) yang menjelaskan bahwa tindakan kekerasan termasuk dalam tindakan kriminal yang terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Kejadian tindakan kekerasan bahkan sulit dicegah, dalam teori ini juga menjelaskan semakin sering orang tua bertengkar, maka semakin sering pula satu atau keduanya memukuli anak-anaknya.

Implementasi kebijakan kabupaten layak anak dengan pendekatan desa ramah anak di desa gunem kecamatan gunem kabupaten rembang oleh Dini Oktavia Kurniawati dan Aufarul Marom (2020). Penelitian yang diupload dalam Journal of Public Policy and Management Review menjelaskan bahwa

permasalahan yang diambil terkait dengan kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Rembang dengan pendekatan desa ramah anak, dalam hal ini cangkupannya dengan permasalahan pemenuhan hak anak dan dengan maraknya pernikahan anak di Kabupaten Rembang. Dalam jurnal ini peneliti menjadikan teori “5 tepat” untuk menjadikan operasionalisasi konsep dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti, yaitu terdiri (1) Ketepatan Kebijakan (2) Ketepatan Pelaksana (3) Ketepatan Target (4) Ketepatan Lingkungan (5) Ketepatan Proses.

Pelatihan Teknis Pengaduan Online Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Untuk Ibu-Ibu PKK Kelurahan Purwosari Baturraden oleh Fiby Nur Afiana dan Bambang Pulu Hartato (2018). Penelitian yang diupload dalam Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan pengabdian kepada masyarakat di kelurahan Purwosari Baturraden. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan dan pendampingan kepada warga di Kelurahan Purwosari Baturraden, khususnya untuk ibu-ibu PKK. Tujuan penyuluhan ini supaya ibu PKK bisa berperan aktif dalam mengenali dan mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di sekitar kelurahan Purwosari Baturraden. Dalam penelitian ini peneliti menekankan pada kelompok masyarakat untuk bisa mengidentifikasi tindakan yang dikategorikan sebagai tindak kekerasan terhadap anak dan peneliti juga memberikan arahan untuk bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh KPAI melalui website yaitu (<http://www.kpai.go.id>) maupun aplikasi yang bernama "pandawa care."

Pengaturan perlindungan anak di kabupaten sumba timur oleh Claudio Patrix Udje (2023). Penelitian yang diupload dalam COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjelaskan terkait pengaturan perlindungan anak di Sumba Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan mewujudkan keadilan bagi anak diantaranya terkait Pemenuhan hak anak dalam mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, merancang kebijakan kordinasi sinkronisasi, sosialisasi, fasilitasi dan distribusi terkait dengan pelaksanaan pengawasan pemenuhan hak anak, memberikan pelayanan kepada anak yang meliputi pelayanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi, psikologis dan hukum, mengadakan pelatihan kader untuk perlindungan anak yang berbasis masyarakat, melakukan kolaborasi bersama lembaga sosial masyarakat dalam melakukan upaya pembinaan di tengah masyarakat.

Peran Desa Bedahlawak sebagai Desa Ramah Anak dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh Hailitik, Asri Gresmelian Eurike (2023). Penelitian yang diupload dalam LITERATUS menjelaskan tentang implimentasi hak dan kewajiban yang dimiliki setiap anak di desa bedahlawak dalam program desa ramah anak. Langkah awal yang dilakukan oleh desa bedahlawak yaitu dengan melakukan workshop dan pelatihan mengenai indikator Desa Ramah Anak. Dalam jurnal ini menerangkan bahwa Desa Bedahlawak perlu menetapkan indikator khusus terkait perlindungan anak seperti keberadaan lembaga perlindungan anak yang menangani korban kekerasan dan eksploitasi anak, melayani adanya kasus seperti pornografi, narkoba, adanya fasilitas layanan

untuk anak penyandang disabilitas , dan solusi penyelesaian terkait adanya kasus mengenai anak yang berkonflik atau menghadapi hukum. Implementasi dari program Desa Ramah Anak di Desa Bedahlawak disambut masyarakat dan kepala desa dengan antusias. Mereka ikut terlibat juga di dalam program yang diadakan.

Optimalisasi Peran Organisasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Asliani, Mhd Teguh Syuhada Lubis (2021). Penelitian yang diupload dalam Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang merugikan pihak-pihak dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali terjadi pada perempuan dan anak-anak yang menjadi sasaran dalam kekerasan. Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan bahwa masyarakat bisa berperan aktif dalam penegakan hukum terkait kekerasan, selain itu PKK dapat berpartisipasi dalam memberikan pendampingan kepada anggota keluarga, tujuannya supaya kedepannya kesejahteraan keluarga bisa menjadi tanggungjawab bersama.

Upaya Mencegah Maraknya Kekerasan Seksual Anak Melalui Gerakan Keluarga Indonesia Lindungi Anak Dari Kekerasan Seksual (KILAS) oleh Yenny A. S., Rini S., Aleksander S., Siswawdi, Sri A. S., dan Temmy Hastian (2023). Penelitian yang diupload dalam J-Dinamika menjelaskan tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya kekerasan seksual pada anak, dengan melibatkan peran dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Tujuan dari melibatkan peran PKK yaitu karena anggota dari PKK melibatkan anggota dari

lapisan bawah yaitu keluarga dan PKK diharapkan mampu mengedukasi masyarakat agar anak dapat terhindar dari korban kekerasan seksual.

Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak oleh Guntur J. A., Yaqub C., Hirshi A. (2021). Penelitian yang diupload dalam Jurnal Respon Publik menjelaskan tentang implementasi program kerja kota layak anak kota Malang dalam memenuhi hak anak dan perlindungan anak. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam melakukan program kerja tersebut pemerintah kota Malang sudah terbilang baik, namun pemerintah masih belum maksimal dalam sosialisasi terkait dengan program kerja layak anak dan pemerintah masih kurang dalam penguatan kebijakan dari pemerintah kota dalam memaksimalkan pelaksanaan kebijakan.

Edukasi Pola Asuh Anak di Era Digital Bagi Ibu PKK Dusun Siten Bantul oleh Uning Lestari, Siti S., Prita H. (2021). Penelitian yang diupload dalam jurnal Dharma Bakti menjelaskan tentang metode sosialisasi dengan materi pola asuh terhadap anak di era digital untuk Ibu-Ibu PKK di dusun Siten Bantul. Dalam jurnal ini ibu PKK diberikan tips untuk mengasuh anak supaya orang tua bisa menyesuaikan pola pengasuhan sesuai dengan perubahan era sehingga bisa melakukan pendampingan anak yang sesuai.

Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Pkk Dalam Menangani Kesehatan Anak, Ibu Hamil, Dan Lansia Sesuai Isi 10 Program Pokok Pkk Di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang oleh Nikmatul Laily Agustin, Slamet M., Roni P. W. (2021). Penelitian yang diupload dalam Jurnal Respon Publik menjelaskan tentang peran PKK dalam menangani kesehatan anak,

ibu, lansia yang ada di Kelurahan Kauman kecamatan Klojen Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemberdayaan perempuan melalui gerakan PKK bisa meningkatkan kesehatan anak, ibu, dan lansia Kelurahan Kauman kecamatan Klojen Kota Malang. Penelitian ini menjelaskan peran dari PKK sangat membantu dalam masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan dalam meningkatkan partisipasi ibu, anak, dan lansia untuk mengikuti kegiatan posyandu.

Dari beberapa karya ilmiah diatas penelitian mengenai perlindungan anak dengan studi kasus peran ibu PKK di Kabupaten Rembang belum ada sebelumnya, maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan menitikberatkan pada peran dari ibu PKK dalam pengelolaan dan peranannya untuk meningkatkan perlindungan anak di Kabupaten Rembang serta peneliti akan membahas capaian yang bisa didapatkan dari adanya perlindungan anak dan usaha yang bisa dilakukan agar pelaksana bisa berjalan sesuai strategi yang dilaksanakan.

1.6 Kajian Teori

Kerangka teori merupakan suatu penjelasan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dengan berdasarkan teori-teori yang nantinya akan digunakan ke dalam penelitian. Kerangka teori berisikan pendapat-pendapat para ahli yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya dan didukung dengan adanya data.

1.6.1 PKK: Peran Domestikasi (State Ibuism) atau Transformasi Sosial

PKK bisa dikategorikan dalam organisasi perempuan atau kelompok perempuan. Definisi terkait dengan perempuan berasal dari pembahasan tentang feminisme perempuan yang menjelaskan bahwa perempuan adalah istilah untuk konstruksi sosial yang istilahnya ini ditetapkan dan dikonstruksikan melalui penggambaran (Humm,2002). Perempuan dalam konteks perlindungan anak ini merujuk pada peran, tanggung jawab, dan kontribusi seorang perempuan dalam memberikan perlindungan, menjaga, dan memastikan kesejahteraan bagi anak-anak. perempuan mempunyai berbagai peran dalam perlindungan anak, mulai dari peran perempuan sebagai seorang ibu, wali, guru, pekerja sosial, hingga pemangku kebijakan yang bisa memberikan pengaruh kebijakan dan praktik perlindungan pada anak.

PKK sudah menjadi obyek kajian ilmu sosial dan ilmu politik sejak lama khususnya sejak era orde baru. Dalam buku Julia Suryakusuma menjelaskan terkait konsep "*State Ibuism*" dengan merujuk pada kebijakan orde baru yang mendomestifikasi peran perempuan dan menempatkan perempuan sebagai pendukung dari karir publiknya laki-laki. Sebagai organisasi yang berfokus dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga PKK memiliki tindakan progresif untuk meningkatkan kondisi perempuan di berbagai daerah. Terdapat beberapa tindakan progresif yang bisa dilakukan PKK diantaranya seperti menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk perempuan diberbagai bidang, kemudian PKK juga bisa ikut terlibat didalam pembangunan keterampilan ekonomi perempuan melalui adanya pelatihan usaha kecil dan mikro kewirausahaan.

Kelompok perempuan dalam hubungannya dengan perlindungan anak merupakan suatu hal yang merujuk pada sekelompok individu perempuan yang berkolaborasi untuk mendorong dan melibatkan diri dalam upaya untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak-anak. Dalam hal ini perlindungan anak bisa dilakukan dari lingkup kelompok terkecil yaitu keluarga. Keluarga sendiri merupakan unit terkecil yang beranggotakan ayah, ibu, dan anak. Keluarga sendiri menjadi tempat pertama anak mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Sehingga diperlukan kerja sama antara kedua orang tua dalam mendidik anaknya. Orang tua khususnya ibu memiliki peran penting dalam membimbing anaknya dalam menjalankan setiap proses kehidupan. Pada dasarnya insting seorang ibu untuk memberikan perlindungan kepada anaknya sangatlah kuat. Sehingga peran seorang ibu itu sangat penting didalam pola asuh anak dan sebagai perlindungan bagi anak.

Dalam hal ini menurut Julia Suryakusuma PKK dalam konteks “*State Ibusm*” itu adalah pendomestikan perempuan di dalam urusan publik. Adanya PKK itu sama dengan Dharma Wanita untuk PNS, Bhayangkari untuk Polri, dan Patrika Candrakirana untuk Tentara. Tujuan dari itu semua hanya memberi dukungan pada karir para suami. Dalam konsep *State Ibusm* yang dijelaskan Julia Suryakusuma, pada masa pemerintahan orde baru itu terlalu banyak berasumsi mengenai penempatan perempuan itu sebagai pendukung saja atau supporting. Padahal terdapat beberapa penelitian terkait dengan PKK dan organisasi perempuan yang lain itu telah mengalami berbagai hal dalam proses transformasi di era reformasi. Transformasi di masa reformasi itu macam-macam, diantaranya

terdapat gagasan dari State Ibuisme yang menyatakan adanya penguatan domestifikasi perempuan. Transformasi PKK tidak hanya sekedar mengurus urusan domestik tetapi PKK juga mengurus persoalan permasalahan yang ada di masyarakat.

Istilah “ *Ibuisme* “ pertama kali dikenalkan oleh Madelon Djajadiningrat-Nieuwenhuis yang tujuannya untuk merelasikan kombinasi antara tata nilai kaum priyayi elite dengan tata nilai pada kaum petite-bourgeois Belanda, hal ini untuk membentuk suatu ideologi yang mendukung setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang ibu di dalam keluarga, kelas, maupun negara tanpa mengharapkan adanya imbalan (Nieuwenhuis, 1987:44). Kemudian konsep ibuisme ini dilanjutkan oleh Julia Suryakusuma dalam buku yang berjudul “ *Ibuisme Negara* “ membahas konsep Ibuisme negara yang merupakan suatu paham yang memposisikan kaum perempuan sebagai pekerja domestik tanpa dibayar dengan tujuan mendukung kapitalisme negara. Konsep ibuisme negara menjelaskan adanya peran pemerintah dari orde baru dalam memperkenalkan pengorbanan diri kaum perempuan untuk tujuan mereka sendiri (Suryakusuma, 1991).

Dalam kaitannya dengan ibuisme ini terdapat kelompok perempuan dari komunitas pemberdayaan perempuan. Peran dari komunitas pemberdayaan perempuan dalam konteks perlindungan anak diantaranya sebagai komunitas yang memberikan perlindungan dan pencegahan kekerasan pada anak. Peran sendiri merupakan suatu hal yang menekankan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sesuatu proses (Soekanto, 1999:269). Konsep ibuisme ini terjadi pada masa rezim orde

baru yang dimana memberikan dimensi waktu untuk melihat bagaimana efektifnya rezim dalam mengatur seorang perempuan.

Dalam konteks *State Ibuisme* terkait peran pemberdayaan perempuan ini selama orde baru pemerintah membentuk program terkait dengan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang disebut PKK. Suryakusuma menjelaskan bahwa dalam program sepuluh pokok PKK ini menempatkan diskursus penghayatan dan pengalaman pancasila ke dalam urutan pertama dari sepuluh program pokok PKK, sehingga PKK hadir atas nama negara. Kemudian sebagai puncaknya ketika negara memasukan PKK ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada tahun 1983 (Suryakusuma, 1991). PKK menurut banyak kalangan lahir dari adanya semangat perjuangan kemerdekaan, terutama dalam konteks pergerakan perempuan pada masa orde baru yang telah berubah menjadi sebuah komunitas atau organisasi masyarakat di bawah pemerintah nasional (Branson dan Miller, 1988; Gerke, 1992; Wierenga, 1993). Maka dari itulah muncul kategori baru dalam bidang sosial yang didukung oleh negara, yaitu ibu rumah tangga, dan pengerahan kaum perempuan Indonesia, khususnya kaum perempuan dari kelas bawah, sebagai pekerja kesejahteraan sosial yang tidak dibayar (Newberry, 2013;8).

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 1 tahun 2023 pasal 1 menjelaskan terkait dengan Pemberdayaan masyarakat melalui adanya gerakan pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK). PKK merupakan sebuah gerakan nasional untuk membangun masyarakat supaya bisa tumbuh dari pengelolaan diri, dan perempuan sebagai penggerak dalam membangun keluarga

sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Sehingga PKK bisa terwujudkan keluarga yang bertaqwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan membina keluarga untuk bisa mewujudkan keluarga yang sejahtera (Tim Penggerak PKK Pusat, 2010:11).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2013 pasal 1 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui adanya gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK). Adanya PKK ini digunakan sebagai salah satu mekanisme dan penggerak yang berkembang di desa-desa yang ada di seluruh penjuru tanah air, tujuannya untuk memberikan keberhasilan sosok perempuan dalam peran utamanya tersebut (Tim Penggerak PKK Pusat, 2010:11).

Namun demikian, dalam beberapa kasus PKK sudah mengalami transformasi, PKK juga ikut mengambil peran dalam isu kekerasan pada anak, isu prostitusi anak, isu kesehatan mental pada anak. Dalam hal ini proses Revitalisasi PKK tidak hanya melibatkan perubahan struktural, tetapi juga mencakup transformasi paradigma dan program kerja agar dapat lebih responsif terhadap isu-isu perempuan dan kesetaraan gender yang terus berkembang. Pentingnya kerja sama dengan berbagai organisasi dan kelompok perempuan di desa menjadi fokus, bukan hanya dengan Linmas, Hansip, dan LKMD. Dalam revitalisasi ini, perlu meninggalkan model kepemimpinan yang mengikuti jabatan suami secara otomatis, dan beralih ke pilihan demokratis berdasarkan kapasitas dan kompetensi. Hal ini bertujuan untuk mengubah peran PKK menjadi bagian integral yang lebih progresif dalam pelaksanaan program pembangunan dengan fokus pada kesetaraan gender.

1.6.2 Teori Pengaruh Masyarakat

Berdasarkan buku mengenai “*Children and families in communities: Theory, research, policy and practice*” dijelaskan bahwa adanya lingkungan tempat tinggal yang dipenuhi dengan komunitas-komunitas juga sangat penting bagi pertumbuhan anak dan keluarga. Adanya hipotesis terkait dengan budaya kemiskinan (Lewis, 1966; Bertrand dkk., 2004) menjelaskan bahwa kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan akademik menyatakan bahwa orang tua yang hidup dalam kemiskinan sudah terbentuk dari lintas generasi. Adanya budaya kemiskinan ini melibatkan suatu ekspektasi yang rendah untuk anak-anak karena budaya gaya pengasuhan yang diturunkan dari generasi sebelumnya, sehingga memunculkan terjadinya hambatan untuk anak bisa keluar dari kemiskinan.

Bernstein (1960,1974) menjelaskan terkait perbedaan dalam pola bicara dari orang tua yang berada di kelas pekerja dengan orang tua kelas menengah. Menurut Bernstein, masyarakat kelas pekerja dalam memberikan pelatihan kepada anak cenderung menggunakan kode yang terbatas, sedangkan untuk kelas menengah cenderung menggunakan kode yang rumit dalam memberikan pembelajaran ketika anak mulai belajar berbicara. Faktor dari lingkungan juga berkaitan erat dengan cara keluarga menciptakan ruang lingkungan yang aman untuk anak-anak supaya mempunyai relevansi yang besar dengan fungsi keluarga. Diperlukannya pendekatan psikologis di dalam komunitas supaya menciptakan rasa aman diantara berbagai pihak. Rasa kebersamaan merupakan sebuah konstruksi yang sarat emosi yang mencerminkan proses sosial yang mendorong komunitas yang kohesif dan suportif (Cantillon, Davidson & Schweitzer, 2003).

Cara untuk bisa berdampak lingkungan budaya dan keluarga diperlukan adanya pengaruh dari sosio-kultural dalam menghadapi proses perkembangan anak. Menurut Ogbu (1981) adanya kompetensi dan perilaku anak yang dihargai ditentukan berdasarkan ketersediaan sumber daya dan teori tradisional terkait pengasuhan anak yang ditentukan melalui cara kebiasaan dari orang tua.

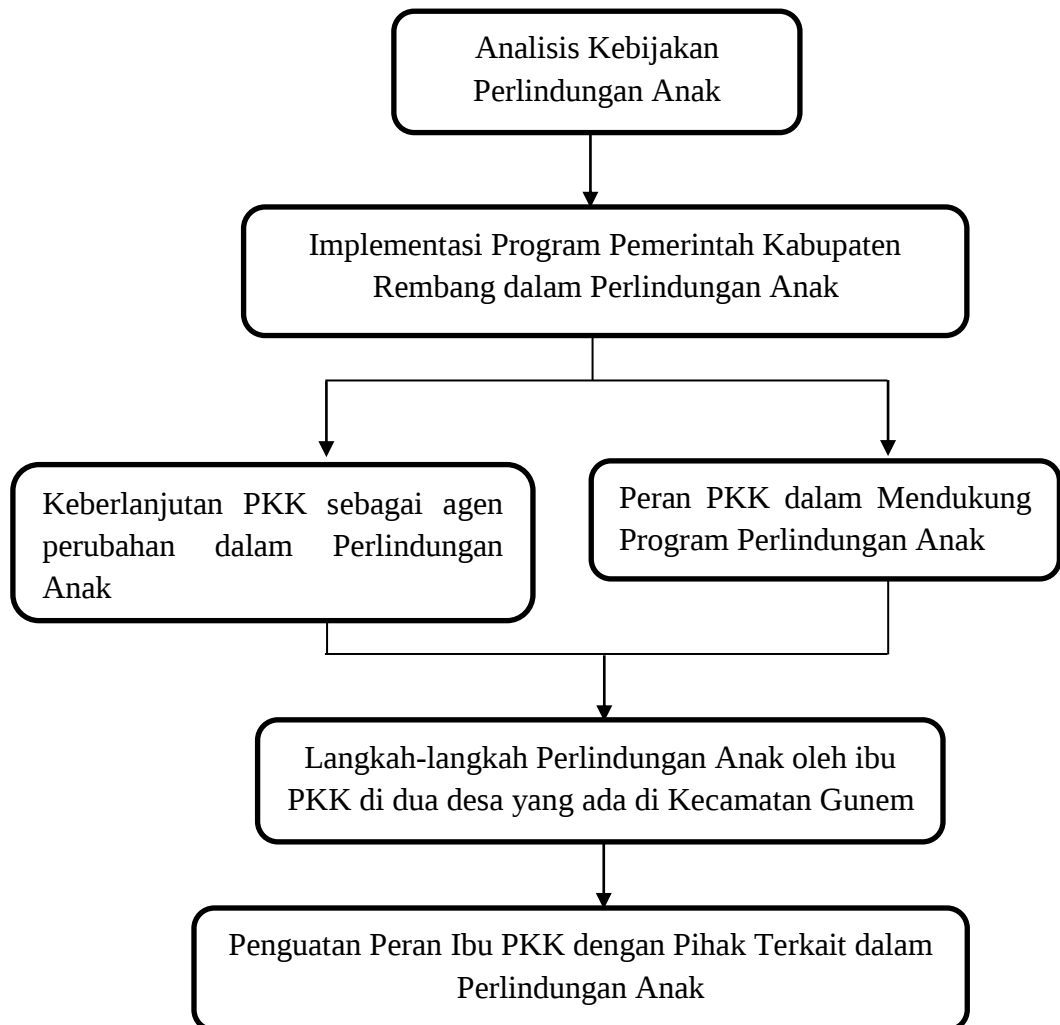
1.7 Operasional Konsep

Dalam hal ini menurut pandangan dari Nani Darmayanti (dalam Mushlihin 2013) mendefinisikan operasional sebagai suatu rumusan terkait dengan ruang lingkup dan mempunyai ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian di dalam karya ilmiah. Berikut ini operasional konsep yang akan di teliti:

Konsep dan Definisi Konsep	Dimensi	Indikator (Pertanyaan)
Analisis merupakan bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menemukan atau menyelidiki adanya suatu kebijakan terkait	Kebijakan	1. Bagaimana kebijakan yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Rembang dalam persoalan perlindungan anak? 2. Apakah kebijakan tersebut konsisten dengan norma-norma dan regulasi nasional terkait dengan perlindungan anak?

program yang dijalankan pemerintah yang kemudian akan dilakukan pemantauan terkait program dan ketepatan dari adanya program kebijakan.	Pemantauan	1. Bagaimana komunitas ibu PKK di Kecamatan Gunem terlibat dalam proses pemantauan kebijakan perlindungan anak?
	Ketepatan	1. Bagaimana program dari pemerintah Kabupaten Rembang dalam menetapkan kebijakan perlindungan anak yang ada di Kabupaten Rembang? 2. Apakah program yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Rembang terkait perlindungan anak ini sudah tepat sasaran dalam praktik di Kecamatan Gunem?

1.8 Kerangka Berpikir



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan menyampaikan secara detail terkait dengan fenomena yang akan diteliti. Sehingga dalam penelitian kualitatif ini nantinya penelitian mengamati secara langsung terkait fenomena yang dilihat oleh subjek

penelitian dengan pendekatan deskriptif. Maka dalam hal penelitian ini nantinya peneliti akan menggambarkan dari adanya suatu fenomena yang akan diteliti.

Jenis penelitian kualitatif juga dapat mendeskripsikan sebagai sesuatu panduan untuk penelitian yang dilakukan dengan menghasilkan sebuah data yang sifatnya deskriptif, dalam hal ini bisa berupa kata-kata tertulis maupun lisan yang bersumber dari orang-orang atau perilaku yang bisa di amati (Moloeng,2012;12). Oleh karena itu, peneliti akan menggambarkan fenomena yang diamati dengan apa adanya. Sehingga penelitian ini tepat digunakan dalam pengaplikasian penelitian terkait dengan peran ibu pkk di Kecamatan Gunem terkait dengan kebijakan perlindungan anak.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Gunem dan di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang hal ini di karenalan desa yang ada di Kecamatan Gunem termasuk ke dalam desa ramah anak.

1.9.3 Subjek penelitian

Subjek penelitian dapat diartikan sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenaunya ingin diperoleh terkait keterangan (Tatang, 1989). Dalam penelitian ini yang menjadi subjek atau riset terkait penelitian ini merupakan informan atau narasumber yang ada di Desa Gunem dan Desa Tegaldowo khususnya istri dari Kepala Desa gunem dan Tegaldowo, Ibu PKK yang terdapat di dua desa tersebut dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DINSOSPPKB) Kabupaten Rembang.

1.9.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber dan data yang diambil peneliti ini merupakan data yang bersifat deskriptif. Adapun data angka maupun diagram juga digunakan sebagai data pendukung. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu diantaranya sebagai berikut :

1) Data Primer

Data ini diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang sudah ditetapkan dalam penelitian. Sehingga data primer ini nantinya hasil wawancara dari narasumber yang sudah ditetapkan peneliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder ini tidak diperoleh secara langsung yang artinya data ini bisa dipeproleh melalui penelitian terdahulu, literature, atau laporan kegiatan. Sehingga sumber data sekunder ini adalah hasil dari observasi serta sudi observasi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mencari data dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi dari narasumber yang telah ditentukan peneliti. Wawancara ini nantinya akan mendatangi narasumber dan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dilokasi yang telah ditentukan peneliti, serta dalam melakukan observasi peneliti harus bisa mengamati secara seksama terkait apa yang sebenarnya terjadi dilapangan.

3. Dokumentasi

Metode pengambilan data yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan studi penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan maupun nontertulis. Dokumentasi menjadi teknik pengambilan data yang sangat penting karena dalam melakukan wawancara dan observasi akan bisa dipercaya jika didukung dengan adanya perspektif dokumentasi dalam memperoleh informasi yang terstruktur dan mendukung data.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data adalah tahapan dari menguraikan data-data yang diperoleh peneliti dengan menggunakan teori sebagai acuan. Miles & Huberman, 1984 menjelaskan bahwa analisis data memiliki 3 aktivitas yaitu mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Selain itu menurut Ulber, 2009 dalam kegiatan mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan ini dilakukan secara bersamaan dan menjadi satu sama lain, sebagai tahapan serta komunikasi ketika sebelumnya, ketika terjadi, dan setelah mengumpulkan data yang linier supaya terbentuk pembangunan pengetahuan secara umum yang dinamakan analisa.

Maka dalam teknik analisis data dan interpretasi data ini secara bersama saling terkait diantaranya yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan adanya transformasi data kasar yang didapatkan selama proses pencatatan tertulis di lapangan (Subadi, 2006). Reduksi data bisa dimaknai sebagai kegiatan untuk memilih data yang sudah diperoleh di lapangan selama observasi maupun wawancara dengan kemudian mengelompokkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak dibutuhkan dengan maksud supaya data yang diambil bisa disimpulkan serta dilakukan proses verifikasi. Dengan demikian penelitian yang dilakukan tidak hanya pemaparan data saja melainkan juga berisi sebuah informasi yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian data ini dilakukan dengan tepat dan sistematis supaya tidak menimbulkan kebingungan ketika dibaca. Tahapan ini disajikan kumpulan data yang telah disusun secara sistematis sehingga bisa didapatkan kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini berbentuk teks yang disajikan secara naratif.

3. Verifikasi Data

Penulis menyimpulkan hasil analisis terhadap metode yang digunakan. Setelah mengumpulkan data selesai dilakukan, selanjutnya peneliti melanjutkan proses pencatatan terkait hubungan dari data-data, sebab akibat dan yang lainnya.

Pada tahap verifikasi data ini peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber maupun berdasarkan pada apa yang didapatkan selama pencarian data tersebut.